



KR-Budiono
Gubernur Ahmad Luthfi saat memberi keterangan kepada wartawan soal Daerah Istimewa Surakarta

USULAN DAERAH ISTIMEWA SURAKARTA Harus Ada Kajian

SEMARANG (KR) - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menanggapi isu mengenai usulan Daerah Istimewa Surakarta. Menurut Gubernur, persoalan pemekaran wilayah merupakan kewenangan pemerintah pusat. Selain itu juga pemekaran harus dikaji dari banyak aspek.

“Saya belum tahu ada wacana pemekaran tersebut. Namun yang jelas, soal kebijakan pemekaran wilayah kewenangannya ada di pemerintah pusat,” kata Ahmad Luthfi kepada wartawan di Semarang, Kamis (1/5).

Menurutnya, jika memang ada rencana pemekaran eks Karesidenan Surakarta menjadi provinsi tersendiri, harus ada kajian dari berbagai aspek, mulai dari ideologi, politik, sosial, pertahanan, keamanan, dan aspek lainnya. Semua aspek ini harus dikaji, dan keputusan ada di pusat.

Mantan Kapolda Jateng itu menyatakan, justru hal yang lebih penting untuk digenjot saat ini adalah menumbuhkan perekonomian di wilayahnya. Khususnya, geliat ekonomi di wilayah aglomerasi sejumlah eks karesidenan di Jateng. “Yang perlu kita tegaskan, saat ini harus bisa menumbuhkan perekonomian baru. Itu yang penting,” tegas Gubernur.

Dia mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi bisa digarap di wilayah aglomerasi eks karesidenan Semarang Raya, Solo Raya, Kedu Raya, Banyumas Raya, Pekalongan Raya, dan lainnya. Untuk menumbuhkan ekonomi di wilayah tersebut, butuh kebersamaan dari berbagai pihak.

(Bdi)-f

‘MAY DAY’ DI KARANGANYAR Buruh Gelar Aksi Damai



KR-Abdul Alim
Bupati Karanganyar Rober Christanto bersama para buruh.

KARANGANYAR (KR)- Ratusan buruh yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Buruh Karanganyar (Gebuk menggelar aksi damai di depan Kantor Bupati Kabupaten Karanganyar bertepatan dengan Hari Buruh pada Kamis (1/5). Perwakilan buruh diterima langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar, Rober Christanto dan Adhe Eliana, serta pejabat dinas terkait di Ruang Garuda Kantor Setda Karanganyar. Polisi juga melakukan pengamanan aksi tersebut.

Perwakilan Gebuk, Haryanto menyampaikan ada enam tuntutan yang disampaikan dalam aksi kali tersebut. Yakni law enforcement atau penegakan hukum, stop PHK massal, perlindungan terhadap karyawan yang terdampak PHK, pembuatan Undang Undang baru yang lebih baik dari UU Cipta Kerja, penghapusan sistem kerja outsourcing, dan lawan korupsi.

Gebuk menyalahkan adanya pelanggaran yang dilakukan perusahaan, seperti PHK menjelang Idul Fitri, pekerja dirumahkan tapi tidak dibayar dan lainnya. Buruh minta kepada pemda agar penegakan hukum tenaga kerja benar-benar ditegakkan.

Bupati Karanganyar Rober Christanto mengatakan aspirasi para buruh telah diterima dan akan diteruskan ke pemerintah pusat. Dia mengungkapkan, pemda terbuka kepada serikat pekerja atau perusahaan untuk berkomunikasi manakala ada permasalahan.

“Kami tampung semua masukan dari para buruh. Tentunya kami akan memfasilitasi dan mendorong semuanya bisa berjalan dengan baik,” tegasnya. (Lim)-f



KR-Thoha
Ketua DPRD Kabupaten Magelang saat menyerahkan secara simbolis klaim manfaat BPJS Ketenagakerjaan. Ini sekaligus merevisi foto berita Peringatan May Day di Kabupaten Magelang di SKH KR, Sabtu (3/4).

SUMBER AIR BEBENG DI GLAGAHARJO

Simbol Persaudaraan Klaten-Sleman

KLATEN (KR) - Sumber Air Bebeng di lembah Bukit Klargon Kelurahan Glagaharjo, Kapane-won Cangkringan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta merupakan simbol eratnya persaudaraan warga dua kabupaten, yakni Sleman dan Klaten. Sejak puluhan tahun lalu, mata air Bebeng menjadi sumber kehidupan yang warga lereng Gunung Merapi yang berada di perbatasan wilayah Sleman dan Klaten.

Bebeng menjadi andalan air bersih yang mencukupi kebutuhan warga di Desa Balerante, Desa Sidorejo dan Desa Panggang Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten, serta mencukupi air bersih untuk warga di Kelurahan Glagaharjo Kapanewon Cangkringan Kabupaten Sleman. Untuk lebih mengintensifkan kebersamaan, Pemkab Klaten dan Pemkab Sleman menyepakati kerja sama secara formal dalam pengelolaan sumber air Bebeng tersebut.

Penandatanganan kerjasama



KR-Sri Warsiti
Jajang dan Suparmono menunjukkan dokumen kerja sama pengelolaan air Bebeng.

dilakukan dalam forum perbatasan di Pendopo Bukit Klargon Sleman, Rabu (30/4), oleh Sekretaris Daerah Klaten Jajang Prihono bersama Asisten Pemerintahan dan Kesra Sleman, Suparmono. Kegiatan itu dihadiri pejabat Balai Taman Nasional Gunung Merapi beserta OPD, lurah, dan camat dari kedua wilayah.

Sekda Klaten, Jajang Prihono, menyampaikan terimakasih atas kerja sama tersebut. “Alhamdulillah, kami berterimakasih kepada Pemerintah Sleman dan masyarakat pengelola sumber air Bebeng yang telah berbagi sumber kehidupan dengan masyarakat Klaten, khususnya di wilayah Panggang, Balerante, dan Sido-

rejo,” kata Jajang Prihono.

Jajang juga menekankan bahwa kerja sama sebenarnya sudah terjalin secara informal sejak puluhan tahun lalu, dan kini diformalkan dengan payung hukum yang jelas. “Kami berharap sumber air Bebeng ini menjadi penghidupan tidak hanya bagi kita hari ini, tetapi juga bagi anak cucu ke depan. Dan lebih dari itu, menjadi media untuk mempererat hubungan antara Klaten dan Sleman,” tambah Jajang.

Asisten Pemerintahan dan Kesra Sleman, Suparmono, menyatakan bahwa hubungan antara masyarakat Cangkringan dan Kemalang sudah seperti saudara. “Mata air Bebeng ini menjadi pengikat dan penguat hubungan antara dua wilayah. Pengelolaannya harus dilakukan bersama dengan semangat keguyuban,” ungkap Suparmono. Kegiatan ditutup dengan aksi simbolis penanaman pohon sebagai bentuk komitmen terhadap konservasi lingkungan.

(Sit)-f

MUTASI DI LINGKUNGAN PEMKAB PURWOREJO

Wabup Tegaskan Bebas dari KKN

PURWOREJO (KR) - Dalam upaya membangun tata kelola pemerintahan yang baik, pencegahan tindak pidana korupsi menjadi agenda yang tidak bisa ditawar. Terlebih indeks integritas Pemkab Purworejo tahun 2024 adalah 76,61 dan berada dalam kategori waspada.

“Tindak pidana korupsi terjadi bukan karena tidak memahami aturan atau undang-undang dari Komisi Pemberantasan Korupsi (PKP). Tetapi lebih kepada komitmen dan karakter,” ucap Wakil Bupati Purworejo Dion Agasi Setiabudi saat Sosialisasi Upaya Pencegahan Korupsi yang diikuti seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Ruang Arahawang Kompleks Kantor Bupati Purworejo, Rabu (30/4).

Sosialisasi itu mengambil tema “Memahami Kerugian Keuangan dan Kerugian Negara: Perspektif Administrasi dan Pidana dalam Pencegahan

Korupsi”, Tujuannya untuk meningkatkan pemahaman ASN terhadap bentuk-bentuk kerugian negara dan keuangan negara yang disebabkan oleh kesalahan administrasi.

“Jadi persoalannya bukan pada pemahaman yang kurang. Pelaku korupsi ini karakter. Maka yang sangat dibutuhkan adalah membangun pondasi komitmen untuk menolak segala sesuatu yang berkaitan dengan tindak perilaku koruptif,” ucapnya.

Wabup menegaskan, jika perilaku korupsi men-gakur di Indonesia, yang dirugikan langsung ada-

lah masyarakat. Ia menceritakan bahwa di awal masa pemerintahan pasca pilkada terdapat celah yang luar bisa besar. Enam bulan setelah pelantikan kepala daerah, ada mutasi jabatan.

Di beberapa daerah celah besar ini seringkali dimanfaatkan, baik oleh kepala daerah maupun orang-orang yang ada di sekelilingnya. “Kami menegaskan dalam pemerintahan Bupati Hj Yuli Hastuti SH dan saya akan berkomitmen untuk menganut sistem meritokrasi dalam mutasi jabatan. Lebih kepada kemampuan dan asas kredibilitas. Komitmen kami



KR-Istimewa
Sosialisasi pencegahan korupsi di ruang Arahawang Kompleks Kantor Bupati Purworejo.

tidak ada serupiahpun yang kami minta,” tegasnya.

Wabup berharap, ASN di lingkungan Pemkab Purworejo bisa membangun komitmen terbebas dari perilaku koruptif dan komitmen untuk mewujudkan visi misi Kabupaten Purworejo. Memang tidak mudah bagi pemerintah untuk mewu-

judkan visi misi dalam kondisi seperti saat ini.

“Sekali lagi saya tegas, jangan memberatkan atau menghambat dengan perilaku tindak pidana korupsi. Pemerintahan lima tahun ke depan harapan saya tidak ada korupsi, sebab kalau ada semakin memberatkan langkah,” tandasnya.

(*-5)-f

DIES NATALIS KE-46 UNTIDAR 2025

Semangat Baru ‘Unggul Berbudaya’

MAGELANG (KR) - Menyemarakkan rangkaian Dies Natalis ke-46 Universitas Tidar (Untidar) Tahun 2025, beberapa kegiatan dilaksanakan di Gedung Kuliah Umum dr HR Suparsono Untidar Kampus Tuguran, Jumat (2/5). Selain orasi ilmiah dan galakarya, juga disampaikan Laporan Tahunan Rektor Untidar dalam Sidang Senat. Juga penandatanganan MoU antara Untidar dengan beberapa pihak juga dilaksanakan di forum ini.

Dalam Laporan Tahunannya Rektor Untidar Prof Dr Sugiyarto MSi menyinggung semangat Unggul Berbudaya, sebagai tema yang menggambarkan tekad untuk menjadi insan akademis yang unggul dalam prestasi, namun tetap berakar pada nilai-nilai



KR-Thoha
Penandatanganan perjanjian kerjasama saat berlangsung.

luhur budaya. Unggul Berbudaya bukan sekadar slogan. Ini adalah filosofi yang mengikat keilmuan, inovasi, dan kearifan lokal sebagai pilar peradaban.

“Sebagai perguruan tinggi yang lahir di Magelang, kami meyakini bahwa kemajuan harus sejalan dengan pelestarian identitas budaya. Unggul tanpa budaya

adalah kosong, berbudaya tanpa keunggulan adalah stagnani,” ungkap Prof Sugiyarto.

Dalam laporan tahunan, Rektor Untidar juga menyampaikan banyak hal. Di antaranya capaian akademik, IPK tertinggi di Program Profesi Guru, sebagai PTN BLU, dan sistem informasi terintegrasi. Juga disampaikan mengenai tantangan mendatang, di antaranya mempertahankan keunggulan akademik sambil memperkuat riset berbasis kearifan lokal. Selain itu, meningkatkan akreditasi internasional tanpa kehilangan identitas budaya, dan mengembangkan Revenue Generating Activity (RGA) seperti eduwisata pertanian dan layanan konseling gizi yang berkelanjutan.

(Tha)-f

TARGET MENTERI DESA PDT

Desa Sumbang Pertumbuhan Ekonomi Nasional

BANYUMAS (KR) - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menargetkan perekonomian desa. Menurutnya dapat menyumbang 2-3 persen pertumbuhan ekonomi nasional. Target ini disampaikan Yandri saat melepas ekspor 18,5 ton gula semut produksi BUMDes Kabul Ciptaku, Desa Langgongsari Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas, Kamis (1/5).

Ekspor ke Hungaria ini merupakan hasil kerja sama antara Kementerian Desa PDT dan Kementerian Perdagangan melalui program Desa Ekspor. Yandri mengungkapkan

bahwa 90 persen kebutuhan gula semut di dunia dipasok dari Indonesia, dan 90 pers produksi gula semut Indonesia berasal dari wilayah Kabupaten Banyumas dan sekitarnya. Ini menjadikan Banyumas sebagai tulang punggung ekspor gula semut.

Menteri Perdagangan Budi Santoso menambahkan bahwa terdapat lebih dari 3.000 BUMDes yang dibina kementerian perdagangan, 700 di antaranya siap mengekspor produknya. Ia berharap desa-desa yang siap ekspor dapat menyumbang pertumbuhan ekonomi yang tahun ini ditargetkan sebesar 7,1 persen. Dengan kerja sama yang

baik antara Kementerian Desa PDT dan Kementerian Perdagangan, diha-

rapkan perekonomian desa dapat terus meningkat dan memberikan kon-

tribusi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

(Dri)-f



KR-Dnyanto
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto melepas ekspor gula semut Banyumas ke Hungaria.